

DESAIN KELEMBAGAAN MULTIPihak DALAM RENCANA PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU: *LITERATURE REVIEW*

Syafrial

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Nurdin Hamzah
email: syafri2009@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau sangat dipengaruhi oleh desain kelembagaan multipihak dengan mempertimbangkan berbagai aspek utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Banyak studi menemukan tantangan pertumbuhan ekonomi hijau antara lain kelembagaan, penghargaan terhadap sumber daya alam, dan pilihan antara pertumbuhan ekonomi atau pelestarian lingkungan. Sumber data diambil dari berbagai artikel yang kemudian direview dan diklasifikasi pada konsep pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi hijau, pembiayaan hijau, kerjasama hijau, kelembagaan, juga pengambilan keputusan. Hasil akhir menunjukkan bahwa kelembagaan multi sektor yang melibatkan banyak elemen terutama pihak diluar pemerintah harus memperhatikan aspek dasar pengambilan keputusan, format kelembagaan, dasar pembentukan dan komitmen lembaga.

Kata kunci: Lingkungan, Gerasi, Ekonomi hijau, Kelembagaan, Aktor bukan negara, Pembangunan berkelanjutan

Abstract

This study aims to explain that green growth is strongly influenced by multi-stakeholder institutional design by considering various key aspects: economic, social, and environmental. Many studies have found that the challenges of green growth include institutionalisation, respect for natural resources, and the choice between economic growth or environmental conservation. Data sources were taken from various articles which were then reviewed and classified on the concepts of sustainable development, green growth, green financing, green cooperation, institutions, as well as decision-making. The final result shows that multi-sectoral institutions that involve many elements, especially those outside the government, must pay attention to the basic aspects of decision making, institutional format, basis of formation and institutional commitment.

Keywords: Environment, Generation, Green economy, Institutional, Non state actor, Sustainable development

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi hijau atau lebih dikenal dengan istilah pertumbuhan hijau (*green growth*) menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* adalah upaya meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga alam sebagai aset yang menjadi sandaran manusia (Ahmed et al., 2022). Di Indonesia, skenario pertumbuhan ekonomi hijau merupakan inisiatif bersama yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS dengan dukungan *Global Green Growth Institute / GGGI* (Rany et al., 2020a). Program ini mempunyai target (1). pertumbuhan ekonomi, (2). pertumbuhan inklusif dan adil, (3). ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan, (4). ekosistem penyedia jasa yang sehat dan produktif, dan (5). Pengurangan emisi gas rumah kaca (Anonim, 2015). Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak tahun 2008 telah mendorong negara anggota untuk

menerapkan *green economy* karena didasari fakta bahwa pertumbuhan ekonomi 50 puluh tahun terakhir diikuti dengan penurunan kualitas lingkungan yang sangat parah (Makmun, 2012).

Pearce et al.(1989) memaparkan bahwa konsep pertumbuhan ekonomi hijau dipicu oleh tuntutan pembangunan berkelanjutan yang harus memastikan semua hal baik itu pendapatan riil, standar pendidikan, kesehatan bangsa, kualitas hidup harus tercapai. Peningkatan kualitas lingkungan dianggap sebagai faktor yang berkontribusi pada tujuan pembangunan “tradisional” seperti meningkatkan pendapatan riil. Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan isu yang mengusung konsep keberlanjutan lingkungan seperti *green building*, *green financing*, *green banking*, dan *green growth* (Suparmoko, 2020). Seiring pertumbuhan ekonomi hijau, konsep degrowth justru menggugat ketidakadilan ekologi akibat krisis iklim yang diterima masyarakat terkena dampak pertumbuhan global (Gräbner-Radkowsch & Strunk, 2023). Pertumbuhan ekonomi akan mengangkat kesejahteraan masyarakat apabila rencana aksi mitigasi perubahan iklim tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, akan tetapi menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan (Yufuai & Nurochmat, 2019).

Sebuah penelitian di Cina menemukan sisi gelap financial, bahwa keuangan pertumbuhan hijau tidak beriring dengan industri, perlindungan ekologi, dan pembangunan ekonomi sehingga berakibat tidak pastinya keuangan ekonomi hijau (Yin & Xu, 2022). Pembiayaan hijau dapat menopang kemajuan dan inovasi teknologi, inisiatif ramah lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi hijau, usaha mikro hijau (Fang et al., 2022; Ronaldo & Suryanto, 2022). Namun minimnya pendekatan kebijakan pemerintah membuat indikator pertumbuhan ekonomi tidak stabil (Zhang et al., 2021). Pentingnya keterlibatan pihak perbankan dan lembaga keuangan dalam pembiayaan atau pemberian kredit hijau atas dasar pengurangan polusi tinggi industri (Wu et al., 2022). Lembaga keuangan dan perbankan juga menerapkan aturan ketat dalam upaya perubahan iklim (Srivastava et al., 2022; Tan et al., 2022). Aturan yang diterapkan oleh lembaga keuangan dan perbankan menekankan pada pertanggungjawaban administrasi dan organisasi. Pembiayaan bagi perubahan iklim juga menemui kesulitan dengan penerapan strategi baru “Future of Environment Funds” oleh komunitas pemberi pinjaman (Amighini et al., 2022).

Desain kelembagaan, penghargaan terhadap sumber daya alam, *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Cao et al., 2022; Rany et al., 2020b), serta penerapan kebijakan emisi (Huang & Zhao, 2022; Nababan, 2015) merupakan tantangan bagi keberlanjutan program ini. Trade-off antara kemajuan industri dan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan menjadi persoalan yang rumit terutama di negara berkembang. Investor swasta yang ada masih berorientasi pada penggalan SDA yang ada dan belum tertarik pada investasi hijau khususnya sektor industri. Padahal program pertumbuhan ekonomi hijau dapat berkelanjutan apabila terdapat keseimbangan antara pendanaan hijau yang berasal dari asing dengan investasi oleh pihak swasta seperti perbankan dan lembaga keuangan. Belum idealnya format kelembagaan multipihak sesuai skenario pertumbuhan ekonomi hijau merupakan salah satu tantangan utama belum dilirikinya investasi hijau oleh investor swasta.

Konsep kelembagaan sangat kompleks tidak hanya lembaga formal, tetapi juga informal dan nonformal (Nadiroh et al., 2020). Analisis pengembangan kelembagaan harus dengan pendekatan dari tingkah laku organisasi (*organisational behaviour*), psikologi, sosiologi, antropologi, hukum, dan ekonomi (Syarif, 2013). Belum banyak studi yang membahas secara komprehensif pentingnya memahami proses dan faktor pengambilan

keputusan secara kelembagaan, format kelembagaan, desain kebijakan dan aktor dalam pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan dan pembangunan multi sektor. Kompleksitas masalah atau system yang disebabkan oleh eksistensi dan interaksi sejumlah elemen merupakan suatu tantangan bagi kelompok dalam memecahkan persoalan kelembagaan (Darmawan, 2017).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kelembagaan

Scott (2014) tentang *Institutional Theory* dalam review pribadinya mengungkapkan bahwa kekuatan kelembagaan membentuk pengaturan organisasi. Namun pada kenyataannya organisasi kerja di kelas bawah dan menengah sangat tidak responsif terhadap perubahan dan kompleksitas pekerjaan. Studi Scott berlanjut pada penjelajahan lingkungan “kelembagaan” pada konteks kerangka kerja budaya yang lebih luas dan membentuk bagaimana organisasi formal disusun disekitar sistem pekerjaan. Oliver Williamson (1975) dalam *New Institutional Economy* (NIE) atau konsep ekonomi kelembagaan baru mengembangkan konsep kerangka kerja dari kegagalan organisasi yang selalu disebabkan oleh kombinasi transaksi antara faktor manusia dan faktor lingkungan. Kelembagaan menyediakan aturan dan hukum yang mengatur perilaku manusia dalam mengambil keputusan (Vibriyanti, 2018). Christopher K. Clague seorang ekonom Amerika menguraikan bahwa NIE akan meletakkan kapasitas administrasi pemerintah dalam membentuk kelembagaan bisnis (Williamson, 2000). Veblen dan Hayk menyatakan bahwa kekuatan pemerintah/teknokrat pada dasarnya dapat mendorong pertumbuhan industri tanpa dukungan pemilik modal, akan tetapi pemilik modal tidak dapat menjangkau industri tanpa bantuan teknokrat. Namun bukan berarti kedua pihak tidak saling membutuhkan (Vibriyanti, 2018). Konsep multipihak dimaksudkan untuk mengenalkan mekanisme kerja baru yang akan mengenalkan cara kerja dan penghargaan terhadap pihak lainnya (Yuliani et al., 2006a).

Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik formal maupun informal, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan terhadap hak-hak serta tanggung jawabnya. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada instansi formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank, dan sebagainya (Nadiroh et al., 2020).

Rencana pertumbuhan ekonomi hijau

Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan upaya mengatasi degradasi lingkungan (Mittnik & Semmler, 2013) dan harus didukung oleh peradaban ekologi dan kemajuan sosial (Lin & Zhou, 2022). Beberapa negara berkembang kaya dengan sumber daya, pesat secara ekonomi dengan pertumbuhan industri yang tinggi seperti Cina, Brazil, India, dan juga Indonesia namun mengalami masalah lingkungan yang serius (Jupesta et al., 2011; S. Wang et al., 2022). Rencana Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau seperti di Indonesia dihadapkan beberapa fakta, ekspansi perkebunan kelapa sawit, konversi lahan pertanian, eksplorasi tambang batu bara, deforestasi, model pembuatan kebijakan yang merupakan inisiatif perencana.

Seperti di di Provinsi Jambi yang sedang mempersiapkan kelengkapan pertumbuhan hijau namun berlomba dengan masalah lingkungan yang sangat serius seperti ekspansi lahan 530.721,96 Ha menjadi perkebunan kelapa sawit (*BPS Provinsi Jambi*, 2021a) yang meninggalkan dampak lingkungan seperti kualitas air tanah, limbah cair, populasi hewan (Utami et al., 2017), deforestasi, kebakaran hutan (Azzahra et al., 2017). Penggunaan

53.435 Ha lahan tahun 2019 untuk eksplorasi pertambangan batu bara (*BPS Provinsi Jambi, 2021b*) menyebabkan rendahnya kualitas kesuburan tanah (*Purnamayani et al., 2016*) disertai polusi udara dan kemacetan lalu lintas akibat transportasi pengangkut batu bara.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan *Narative Literature Review* (NLR) digunakan untuk menemukan berbagai alternatif kelembagaan sosial yang mampu mengintegrasikan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sumber data diolah dari artikel sciedirect, google scholar, dan crosref, literatur kemudian dianalisa dan dikelompokkan kedalam matrik untuk menemukan bentuk dan urgensi kelembagaan, metode yang digunakan dalam penelitian, hasil dan rekomendasi dari para peneliti.

Tabel 1. Jumlah Literatur Relevan dalam Isu Pertumbuhan Ekonomi Hijau

| Sumber | Jumlah artikel | Jumlah artikel terseleksi | Cara Koleksi |
|----------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Google Scholar | 11 | 11 | Langsung |
| Science Direct | 20 | 20 | Langsung |
| Crossref | 800 | 27 | Tidak Langsung |
| Total Artikel | | 58 | |

Sumber: Diolah dari *reference manager / mendeley*

Artikel dikoleksi dengan dua cara, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung di ambil dari google scholar dan science direct melalui website www.sciencedirect.com dan www.scholar.google.com dengan menggunakan kata kunci “*green growth*”, “*green economy*”, “*institutional for green economy*”, “*decision making*”, “*decision making and management*”, “*investment factors*”, “*local institutional*”, “*local organizational/instituional*”, Sehingga total artikel yang didapat berjumlah 31 artikel. Secara tidak langsung, artikel di koleksi dari crossref menggunakan aplikasi “*publish or perish (PoP)*” dan mendapatkan 800 file yang terdiri dari artikel dari *book chapter*, buku, jurnal artikel, dan prosiding, dengan menggunakan kata kunci “*green economy*” sebagai domain utama penelitian. Kemudian peneliti hanya mengambil literatur berbentuk jurnal artikel dengan total 219. Selanjutnya, penulis melakukan *cluster* hanya artikel yang mempunyai reputasi tinggi dari publisher terpercaya yaitu elsevier BV dan SAGE Publication, yang akhirnya terjaring 27 artikel. Sehingga jumlah keseluruhan artikel yang menjadi rujukan dan dianalisis untuk tulisan ini sebanyak 58 artikel.

Pada tahap berikutnya peneliti melakukan review dan analisa untuk memetakan fokus kajian dari masing-masing artikel, yaitu tentang kelembagaan, pengambilan keputusan, *green partnership*, *eco-industry*, *bankabel*, dan *green funding*. Namun, pemetaan ini hanya merupakan satu tahapan dari upaya peneliti untuk mencari beberapa variabel kunci aspek kelembagaan dalam pertumbuhan ekonomi hijau dalam bentuk matrik dalam aspek kelembagaan, antara lain 1). pengambilan keputusan dalam struktur organisasi, 2). format kelembagaan sektoral dan 3). dasar pembentukan lembaga (visi, misi, komitmen, topik atau pembahasan yang sama) (*Yuliani et al., 2006b*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Investigasi format kelembagaan multipihak dalam konteks pertumbuhan ekonomi hijau merupakan inti dari pembahasan pembangunan berkelanjutan. Untuk menjawab persoalan format kelembagaan yang ideal harus memperhatikan berbagai variabel penting yang dirangkum dari berbagai konsep kajian penelitian sebelumnya.

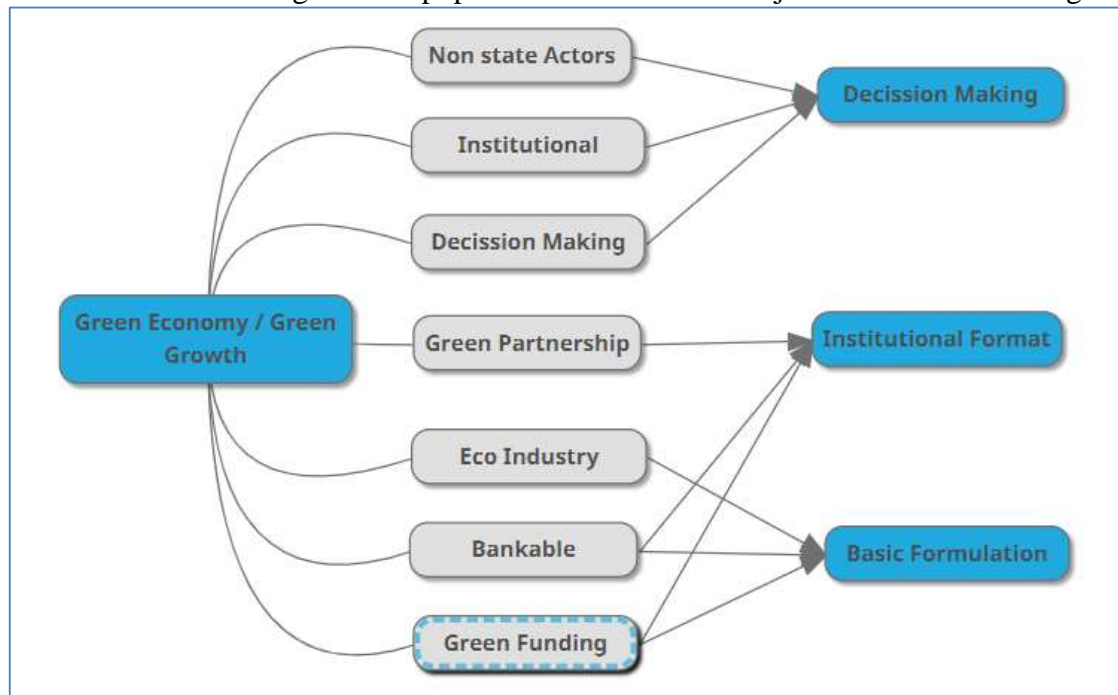
Tabel 2. Peta Kajian Literatur pada dalam Isu Pertumbuhan Ekonomi Hijau

| Konsep kajian | Jumlah artikel | Variable Kelembagaan |
|--------------------------|----------------|---|
| Kelembagaan | 20 | ilan keputusan |
| Pengambilan Keputusan | 10 | ilan keputusan |
| <i>Green Partnership</i> | 3 | elembagaan |
| <i>Eco-Industry</i> | 7 | nbentukan |
| <i>Bankable</i> | 6 | nbentukan, Format kelembagaan |
| <i>Green Funding</i> | 5 | nbentukan, Format kelembagaan ilan Keputusan |
| <i>Non state Actors</i> | 5 | |
| Total artikel | 58 | |

Sumber: Data diolah dengan menggunakan matrix excel dan mendeley

Variabel pengambilan keputusan dalam kelembagaan merupakan domain yang paling banyak dijadikan fokus pada penelitian dengan konsep kajian kelembagaan, pengambilan keputusan, dan *non-state actors*. Selebihnya adalah variabel kelembagaan dengan fokus format kelembagaan serta dasar pembentukan lembaga. Format kelembagaan sendiri tidak hanya berbentuk formal, tetapi juga lembaga informal dan nonformal (Nadiroh et al., 2020), yang terbentuk dengan berbagai aturan baik tertulis maupun tidak.

Gambar 1. Peta hubungan konsep pertumbuhan ekonomi hijau – variabel kelembagaan



Studi menemukan variabel kunci kelembagaan rencana pertumbuhan ekonomi hijau yaitu pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan, format kelembagaan, serta dasar pembentukan lembaga yang mengarah pada komitmen dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembentukan lembaga. Pada kajian ilmu politik, komitmen kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main, kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama (Syarif, 2013).

Pengambil Keputusan dan Pengambilan Keputusan

Pentingnya menggali keinginan individu dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan yang diharapkan dapat menggugah kesadaran pihak lain disekitarnya. Sesuai dengan salah satu target pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusi dan berkeadilan. Para pengambil keputusan dalam struktur organisasi tidak hanya mempunyai bertanggungjawab dari setiap keputusan yang diambil, tapi merupakan nakhoda yang akan mengarahkan lembaganya. L. Wang et al. (2022) dalam penelitian kualitatifnya tentang gaya pengambilan keputusan manajemen perusahaan menyatakan bahwa tanggung jawab sosial, semangat berinovasi, serta semangat mengambil resiko sangat signifikan berkolerasi terhadap inovasi teknologi hijau (GTI), karena itu semangat mengambil resiko merupakan modal dan kekuatan dalam mengambil keputusan. Perez (2015) dalam kajian perusahaan menyimpulkan ada korelasi positif antara kinerja sosial dan kinerja keuangan perusahaan, sehingga tidak ada permasalahan ketika gagasan struktur organisasi perusahaan berkomitmen untuk kebijakan berkelanjutan perusahaan. Efektifitas pengambilan keputusan dalam kelompok tergantung dari beberapa hal seperti mengembangkan pemahaman yang jelas tentang permasalahan, menentukan kriteria keputusan, menilai dengan seksama tentang nilai positif dan negatif dari solusi alternatif, dan mendorong kelompok untuk memilih menghadapi konflik dan bukan menghindarinya (Kreitner & Kinicki, 2014).

Proses pengambilan keputusan eksekutif dalam inovasi teknologi hijau merupakan proses evaluasi yang dilakukan eksekutif terhadap risiko lingkungan dan pendapatan inovasi. Jangan sampai intervensi melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap ekonomi domestik justru membatasi perdagangan internasional seperti di Afrika Selatan (Kiragu, 2016). O'Neill & Gibbs (2016) menyatakan bahwa pembuat kebijakan dalam harus memahami kompleksitas dan kontroversi dari kewirausahaan hijau.

Non-State Actors

Suatu keputusan yang mengedepankan kepentingan multisektor memang sebaiknya diputuskan secara multipihak. Selain pemerintah yang mengeluarkan produk kebijakan, ada pihak lain yang berkepentingan, seperti masyarakat, industri, akademisi, dan investor. *Non-State Actors* (NSA) merupakan representasi para pihak diluar pemerintah dalam sebuah kelembagaan atau organisasi multipihak.

Studi Baroroh & Hidayat (2017) dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Bogor, menemukan elemen selain unsur pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Pihak-pihak tersebut antara lain Kelompok Tani Hutan (KTH), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Studi lain membuktikan PHBM berdampak positif bagi peningkatan pendapatan ekonomi lokal khususnya kelompok petani dari hasil pertanian di sekitar kawasan hutan di Hulu DAS Ciliwung, selain itu juga memberikan peluang usaha pada masyarakat sekitar dalam pengelolaan sepeda gunung (Veriasa et al., 2020). Pada intinya keputusan yang diambil dalam program pertumbuhan ekonomi hijau harus kolaboratif, perpaduan antara pemerintah yang mengeluarkan produk berupa kebijakan dengan non-state actors merupakan sharing partner pemerintah.

Format Kelembagaan

Lembaga yang terbentuk dengan sendirinya karena dorongan oleh keinginan untuk mencapai hal yang lebih menguntungkan bagi pemenuhan kebutuhan secara berkelanjutan, jauh lebih baik dibandingkan dengan lembaga yang terbentuk karena kebutuhan atau keuntungan sesaat. Inisiatif University London Student's Union (Xypaki, 2015) memberikan gambaran proses pembuatan lembaga dengan pola bottom-up dalam gerakan lingkungan hijau berkelanjutan yang diberi nama proyek Naga Hijau. Dalam proyek ini

konsep berkelanjutan dengan menerapkan muatan kurikulum, penelitian, koordinasi kelompok operasi, dan juga proses pengkaderan. Ada lima jenis kelembagaan yang mempunyai komitmen, integritas, dan kompeten, yaitu: (1). Pemerintah, (2). BUMN/BUMD, (3). Dewan masyarakat, (4). Perusahaan, dan (5). Institusi multipihak (Alwi et al., 2016). Nadiroh et al. (2020) berpandangan bahwa lembaga-lembaga seperti BUMN, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi merupakan operator dalam pengelolaan sumber daya alam.

Di Indonesia, koperasi merupakan salah satu pilihan bentuk kelembagaan masyarakat lokal yang bersifat demokratis (Sutikno & Batoro, 2017). Masyarakat dengan skala ekonomi kecil sangat cocok dengan jenis lembaga ini karena dapat memperkuat posisi tawar, disamping jaringannya yang luas terutama untuk produksi maupun pasar. Para pihak yang menjadi anggota dalam koperasi biasanya mempunyai kepentingan yang sama terhadap produk yang sama pula. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan bersama. Karakteristik koperasi lebih menekankan pada konsep dari dan untuk anggota, sehingga belum mampu untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat yang tidak menjadi anggota koperasi. Pemilihan dan pemahaman karakteristik yang melekat pada sumberdaya akan menentukan alternatif kelembagaan yang dibuat sehingga mencerminkan perilaku yang akan mempengaruhi performa lingkungan yang diolah (Mutaqin, 2013). Besar kecilnya lembaga ditentukan oleh seberapa besar tantangan program dan efektifitas koordinasi, termasuk kondisi alam. Pada kondisi geografis yang tidak mempunyai kendala penghalang alami, jarak masyarakat yang berjauhan, maka bentuk lembaga atau organisasi yang besar menjadi pilihan (Mutaqin, 2013)

Kelembagaan di perdesaan memiliki fungsi memberikan energi sosial yang merupakan kekuatan internal masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut, di perdesaan yang saat ini memiliki kesamaan karakteristik tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga gabungan kelompok tani (Nadiroh et al., 2020). Usman dalam Rani & Chaniago (2017) dalam pemanfaatan hutan berkelanjutan, keberadaan lembaga akan sangat potensial dalam mengakomodir peran masyarakat dalam mengontrol kawasan hutan berdasarkan nilai sosial dan kearifan lokal yang berlaku. Sebab struktur merupakan media bagi aturan-aturan, serta pertemuan agen-agen dalam pemanfaatan sumberdaya.

Dasar Pembentukan dan Komitmen Lembaga

Kelembagaan merupakan satu komponen penting yang mempengaruhi pasar dan investasi asing (Azam et al., 2022; Sukarniati & Khoirudin, 2017), karena itu pemerintah harus fokus untuk memperkuat struktur kelembagaan demi pembangunan berkelanjutan. Kualitas kelembagaan yang disertai dengan kebijakan yang baik, akan mengarahkan kegiatan ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi hijau (Ahmed et al., 2022). Kelembagaan yang baik harus mempunyai komitmen yang baik dalam menjalani tujuan kelembagaan (Alwi et al., 2016). Kolaborasi antara perusahaan dengan pembuat kebijakan akan menumbuhkan semangat investor kearah perusahaan inisiatif hijau (Hoong et al., 2022). Menurut O'Neill & Gibbs (2016) memahami ekonomi hijau sebagai sebuah konstelasi dari banyak aktor dan kepentingan dan bukan hanya seperti bisnis biasa.

Komitmen ketika lembaga terbentuk merupakan bagian penting dalam kekuatan lembaga, koordinasi dan interaksi antara karakteristik, pola hubungan antar partisipan (Mutaqin, 2013), peningkatan kapasitas kelompok dan pembagian hasil usaha yang proporsional merupakan jaminan keberlanjutan (Veriasa et al., 2020). Tentu tidak mudah untuk membuat sebuah lembaga untuk berkembang seperti yang diungkapkan oleh Kreitner & Kinicki (2014) dengan memakai teori Tuckman bahwa model proses

perkembangan kelompok memiliki empat tahapan, yaitu proses pembentukan, timbulnya konflik, normalisasi, dan berkinerja, serta penambahan tahap “pembubaran” pada perkembangan teori ini selanjutnya.

5. KESIMPULAN

Program pertumbuhan ekonomi hijau merupakan bentuk pembangunan yang mengusung multisektor yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Isu global dan utama skenario ini muncul dari tantangan perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan ekosistem lingkungan. Tantangan berat bagi semua pihak untuk mengatasi tantangan perubahan iklim, memaksa semua pihak dan dunia internasional untuk mencari beberapa solusi. Eksplorasi dan kurangnya penghargaan terhadap sumber daya alam yang ada, persoalan trade-off atau bentrok kepentingan mana yang harus didahulukan antara pembangunan lingkungan atau ekonomi, kemudian masalah kelembagaan dan kolaborasi pengelolaan program, menjadi persoalan yang sangat serius dan terus dibahas. Pengelolaan program lingkungan yang melibatkan kelompok masyarakat atau komunitas *grassroot* mempunyai dampak sangat positif terhadap kelompok masyarakat maupun masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, F., Kousar, S., Pervaiz, A., & Shabbir, A. (2022). Do institutional quality and financial development affect sustainable economic growth? Evidence from South Asian countries. *Borsa Istanbul Review*, 22(1), 189–196. <https://doi.org/10.1016/J.BIR.2021.03.005>
- Alwi, L. O., Dharmawan, A. H., Fauzi, A., & Hutagaol, M. P. (2016). Tata Kelola Mineral Fund Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Berkelanjutan : (Studi Kasus Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 29. <https://doi.org/10.22212/jekp.v7i1.415>
- Amighini, A., Giudici, P., & Ruet, J. (2022). Green finance: An empirical analysis of the Green Climate Fund portfolio structure. *Journal of Cleaner Production*, 350, 131383. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2022.131383>
- Anonim. (2015). Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia. In *Pemerintah Indonesia _ Global Green Growth Institute (GGGI) Program*.
- Azam, M., Ftiti, Z., Hunjra, A. I., Louhichi, W., & Verhoeven, P. (2022). Do market-supporting institutions promote sustainable development? Evidence from developing economies. *Economic Modelling*, 116, 106023. <https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2022.106023>
- Azzahra, F., Dharmawan, A. H., & Pandjaitan, N. K. (2017). Perempuan dan Resiliensi Nafkah Rumah Tangga Petani Sawit: Analisis Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 25–35.
- Baroroh, A. I., & Hidayat, A. (2017). Analisis Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Cibulao Hijau Di Kampung Cibulao, Puncak Bogor. *Bogor Agricultural University. BPS Provinsi Jambi*. (2021a). BPS.
- BPS Provinsi Jambi*. (2021b). BPS.
- Cao, J., Law, S. H., Bin Abdul Samad, A. R., Binti W Mohamad, W. N., Wang, J., & Yang, X. (2022). Effect of financial development and technological innovation on green growth— Analysis based on spatial Durbin model. *Journal of Cleaner Production*, 365, 132865. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2022.132865>
- Darmawan, D. P. (2017). *Pengambilan Keputusan Terstruktur dengan Interpretive Structural Modeling*.

- Fang, W., Liu, Z., & Surya Putra, A. R. (2022). Role of research and development in green economic growth through renewable energy development: Empirical evidence from South Asia. *Renewable Energy*, *194*, 1142–1152. <https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2022.04.125>
- Gräbner-Radkowsch, C., & Strunk, B. (2023). Degrowth and the Global South: The Twin Problem of Global Dependencies. *Ecological Economics*, *213*. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107946>
- Hoong, K., Lee, L., Hock, T., & Ling, W. (2022). A Model of Green Investment Decision Making for Societal Well-being. *Heliyon*, *8*(April), e10024. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10024>
- Huang, L., & Zhao, W. (2022). The impact of green trade and green growth on natural resources. *Resources Policy*, *77*, 102749. <https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2022.102749>
- Jupesta, J., Boer, R., Parayil, G., Harayama, Y., Yarime, M., Puppim de Oliveira, J. A., & Subramanian, S. M. (2011). Managing the transition to sustainability in an emerging economy: Evaluating green growth policies in Indonesia. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, *1*(2), 187–191. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2011.08.001>
- Kiragu, E. (2016). Transition into a Green Economy: Are There Limits to Government Intervention? *SSRN Electronic Journal*, *05*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2712182>
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2014). *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)* (9th ed.). Salemba Empat.
- Lin, B., & Zhou, Y. (2022). Measuring the green economic growth in China: Influencing factors and policy perspectives. *Energy*, *241*, 122518. <https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2021.122518>
- Makmun, M. (2012). Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *19*(2), 1–15. <https://doi.org/DOI:10.14203/JEP.19.2.2011.1-15>
- Mittnik, S., & Semmler, W. (2013). *Dynamic Modeling and Econometrics and Finance: Green Growth and Sustainable Development* (Vol. 14). <https://doi.org/10.1007/978-3-642-34354-4>
- Mutaqin, Z. (2013). Analisis Kelembagaan Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Hulu DAS Sekampung (Studi Kasus pada Gapoktan Hijau Makmur). *ESAI*, *7*(2), 0–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.25181/esai.v7i2.990>
- Nababan, Y. J. (2015). *Inclusive Green Economy Di Provinsi Kalimantan Timur: Trade-Off Antara Pengurangan Emisi Dan Kinerja Ekonomi*. IPB University; IPB (Bogor Agricultural University).
- Nadiroh, Setyowati, L., & Hasanah, U. (2020). Kelembagaan Lingkungan. In *Universitas Terbuka* (1st ed.). Universitas Terbuka.
- O'Neill, K., & Gibbs, D. (2016). Rethinking green entrepreneurship – Fluid narratives of the green economy. <https://doi.org/10.1177/0308518X16650453>, *48*(9), 1727–1749. <https://doi.org/10.1177/0308518X16650453>
- Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. B. (1989). *Blueprint for A Green Economy*. Earthscan from Routledge.
- Perez, P. O. (2015). The Green Economy Paradox: A Critical Inquiry into Sustainability Indexes. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2653687>
- Purnamayani, R., Hendri, J., Purnama, H., Busyra, Indah, N., & Lubis, S. (2016). Kajian Teknologi Reklamasi Lahan Pasca Tambang Batu Bara di Provinsi Jambi. In *Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi*.

- Rani, A. P., & Chaniago, D. S. (2017). Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan Berbasis Kelembagaan di Kawasan Gunung Sasak. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.17977/UM021V2I12017P023>
- Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020a). Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kuat Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Indonesia Green Growth Program Oleh Bappenas. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 20(1), 63–73.
- Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020b). Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kuat Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Indonesia Green Growth Program Oleh Bappenas. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 20(1), 63–73.
- Ronaldo, R., & Suryanto, T. (2022). Green finance and sustainability development goals in Indonesian Fund Village. *Resources Policy*, 78, 102839. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102839>
- Scott, W. R. (2014). W. Richard SCOTT (1995), Institutions and Organizations. Ideas, Interests and Identities. *M@n@gement*, 17(2), 136. <https://doi.org/10.3917/mana.172.0136>
- Srivastava, A. K., Dharwal, M., & Sharma, A. (2022). Green financial initiatives for sustainable economic growth: A literature review. *Materials Today: Proceedings*, 49, 3615–3618. <https://doi.org/10.1016/J.MATPR.2021.08.158>
- Sukarniati, L., & Khoirudin, R. (2017). Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep Blue Economy Pada Tambak Udang (Studi Kasus Di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2), 52–65. <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i2.198>
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Sutikno, B., & Batoro, J. (2017). View of Analisis Kearifan Lokal Terhadap Pembangunan Ekonomi Hijau di Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).
- Syarif, M. (2013). Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam. In *Media Akademika* (Vol. 28, Issue 3).
- Tan, H., Iqbal, N., & Wu, Z. (2022). Evaluating the impact of stakeholder engagement for renewable energy sources and economic growth for CO2 emission. *Renewable Energy*, 198, 999–1007. <https://doi.org/10.1016/J.RENENE.2022.08.039>
- Utami, R., Putri, E. I. K., & Ekayani, M. (2017). Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Desa Penyabungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(2), 115–126. <https://doi.org/10.18343/jipi.22.2.115>
- Veriasa, T. O., Rustiadi, E., & Kinseng, R. A. (2020). The Impact of Joint Community Forest Management (PHBM) on Local Community Income in Upstream of Ciliwung Watershed, Bogor Regency-Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 556(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/556/1/012009>
- Vibriyanti, N. U. (2018). *Teori dan Aplikasi Ekonomi Kelembagaan bagi Perencana Pembangunan* (I. B. Arjaya, Ed.). Universitas Mahasaraswati Press.
- Wang, L., Zeng, T., & Li, C. (2022). Behavior decision of top management team and enterprise green technology innovation. *Journal of Cleaner Production*, 367(June), 133120. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133120>

- Wang, S., Wang, X., & Lu, B. (2022). Is resource abundance a curse for green economic growth? Evidence from developing countries. *Resources Policy*, 75, 102533. <https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2021.102533>
- Williamson, O. E. (1975). Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization. *SSRN*. <https://ssrn.com/abstract=1496220>
- Williamson, Oliver. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. *Journal of Economic Literature*, XXXVIII, 595–613. <https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595>
- Wu, S., Wu, L., & Zhao, X. (2022). Impact of the green credit policy on external financing, economic growth and energy consumption of the manufacturing industry. *Chinese Journal of Population, Resources and Environment*, 20(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/J.CJPRE.2022.03.007>
- Xypaki, M. (2015). A Practical Example of Integrating Sustainable Development Into Higher Education: Green Dragons, City University London Students' Union. *Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0269094215579409*, 30(3), 316–329. <https://doi.org/10.1177/0269094215579409>
- Yin, X., & Xu, Z. (2022). An empirical analysis of the coupling and coordinative development of China's green finance and economic growth. *Resources Policy*, 75, 102476. <https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2021.102476>
- Yufuai, M. C., & Nurochmat, D. R. (2019). *Evaluasi Rencana Aksi Mitigasi Kabupaten Jayapura (Pendekatan Pembangunan Ekonomi Hijau)*. Library of IPB University. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103247>
- Yuliani, E., Tadjudin, D., Indriatmoko, Y., Munggoro, D., Gaban, F., & Maulana, F. (2006a). Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan. In *Perpusnas*. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/002111>
- Yuliani, E., Tadjudin, D., Indriatmoko, Y., Munggoro, D., Gaban, F., & Maulana, F. (2006b). Kehutanan Multipihak: Langkah Menuju Perubahan. In *Perpusnas*. Center for International Forestry Research (CIFOR). <https://doi.org/10.17528/cifor/002111>
- Zhang, D., Mohsin, M., Rasheed, A. K., Chang, Y., & Taghizadeh-Hesary, F. (2021). Public spending and green economic growth in BRI region: Mediating role of green finance. *Energy Policy*, 153, 112256. <https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2021.112256>